



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
RENCANA KERJA
(RENJA
)
TAHUN 2023

**PEMERINTAH KABUPATEN BREBESKANTOR
KECAMATAN LOSARI**

**Jln. Jendral Sudirman No.04 Telp (0231)831002
Losari Brebes 52255**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena atas hidayah-Nya kami dapat menyusun Rencana Kerja Kecamatan Losari Tahun 2023 sesuai dengan program Kegiatan Pembangunan yang telah disusun melalui kegiatan-kegiatan dengan koordinasi yang terkait dan berkesinambungan.

Melalui Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 ini di harapkan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan Pembangunan khususnya di Pemerintahan Kecamatan Losari. Pembangunan yang berkesinambungan dapat terlaksana dengan baik melalui rencana-rencana yang matang dan mengarah pada sasaran yang tepat. Semua koordinasi yang terkait dalam pelaksanaan rencana kerja ini dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Semoga Rencana Kerja ini dapat terlaksana menuju sasaran yang tepat dan menjadi acuan rencana pembangunan yang berkelanjutan di tahun di berikutnya.

Losari, 18 April 2022

CAMAT LOSARI

SUMARNO,S.Pd,M.Si

Pembina

NIP. 19680712 199710 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. LATAR BELAKANG	3
B. MAKSUD DAN TUJUAN	3
BAB II VISI DAN MISI.....	5
A. VISI.....	5
B. MISI	6
BAB III KEBIJAKAN	9
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN.....	11
BAB V PENUTUP.....	13

Lampiran – lampiran :

1. Matrik Renja Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai upaya perwujudan dan tujuan Pembangunan Nasional sesuai amanat UUD 1945, adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Hal tersebut akan bisa tercapai dengan baik apabila ada kondisi peran serta pemerintah dan masyarakat dalam tingkat kemakmuran yang memadai, untuk itu diperlukan suatu usaha peningkatan kesejahteraan yang terarah, terpadu dan komprehensif. Dengan upaya mewujudkan sarana yang secara langsung dapat memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat. Dalam rangka implementasi tersebut, maka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah dituntut adanya transparansi demokrasi dan *accountable*, sehingga akan terwujud suatu pemerintahan yang bersih (*clean government*). Hal ini akan terlaksana manakala ada hubungan yang sinergis dan saling mendukung antara jajaran birokrasi, legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Berkaitan dengan upaya keberhasilan pembangunan maka dituntut adanya peningkatan kemampuan, baik dari jajaran birokrasi, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima. Oleh karena itu, Kantor Camat Losari sebagai salah satu unsur birokrasi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ikut serta berperan aktif dalam proses pembangunan di daerah. Hal ini seperti yang tertuang pada keputusan Bupati Brebes, Nomor : 102 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas jabatan Struktural pada Pemerintah Kecamatan Losaridi Kabupaten Brebes. Untuk itu dengan berpedoman kepada Renja atau Rencana Kerja Kantor Camat Losari, maka akan dapat terencana serta tersusun program-program pemabnguna untuk lima tahun ke depan, yang merupakam suatu acuan untuk dapat melaksanakan suatu program dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang hendak dilaksanakan sesuai dengan keadaan, kondisi, kemampuan dan kebutuhan masyarakat Kantor Kecamatan Losari dimasa yang akan datang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Recana Kerja Kecamatan Losari Tahun 2023 yang selanjutnya kita sebut Renja Kecamatan Losari, disusun dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus acuan ke depan yang berpedoman pada program-program kegiatan pelaksanaan pembangunan yang terarah dan terencana dalam mewujudkan visi, misi dan program pelaksanaan

prioritas yang telah disepakati bersama oleh seluruh pemangku kepentingan Pembangunan, selama kurun waktu satu tahun ke depan.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renja Kecamatan Losari Tahun 2023 adalah guna mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam mewujudkan tujuan pembangunan selama periode waktu tahun, guna menjamin terciptanya integrasi, konsistensi dan sinergi, baik antar wilayah antar perencanaan kebutuhan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam rangka membantu mewujudkan visi dan misi yang hendak kita capai dalam kurun waktu satu tahun ke depan, serta guna menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien berkeadilan, berkelanjutan dan mengoptimalkan program peran serta masyarakat dalam pembangunan.

BAB II

VISI DAN MISI

A. Visi

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 adalah “Brebes yang Madani, Maju dan Sejahtera”.

Selanjutnya, perlu diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung, sehingga segenap pemangku kepentingan memiliki komitmen untuk bersinergi secara optimal untuk memberikan kontribusi bagi upaya pencapaiannya.

Brebes. Brebes diartikan sebagai suatu daerah otonom. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom menunjukkan suatu kesatuan pemerintahan dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimiliki.

Madani. Madani adalah masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, beradab, demokratis, dan berbudaya tinggi. Madani juga terkait dengan adanya pengakuan atas keragaman atau pluralisme dalam masyarakat. Perilaku masyarakat madani dalam menghadapi berbagai permasalahan baik selalu dihadapi dengan sopan santun dan berperadaban serta mencari jalan keluar dengan bermusyawarah untuk mufakat. Madani menghendaki sikap non diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan sehingga memberikan hak, kemampuan dan kesempatan bagi segenap masyarakat dan lembaga lembaga swadaya untuk terlibat dalam pembangunan. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi madani adalah terpeliharanya eksistensi agama ataupun ajaran-ajaran yang ada dalam masyarakat; terpelihara dan terjaminnya keamanan dan ketertiban serta keselamatan; tegaknya kebebasan berpikir yang jernih dan sehat; terbangunnya eksistensi kekeluargaan yang tenang dan tenteram dengan penuh silaturahmi dan tenggang rasa; terbangunnya kondisi daerah yang demokratis, santun, beradab serta bermoral tinggi; terbangunnya profesionalisme aparatur yang tinggi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab yang mampu mendukung pembangunan daerah.

Maju. Maju diartikan pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi,

profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Maju juga diarahkan pada terbentuknya daerah yang mandiri dengan segenap potensinya namun tetap mengedepankan pentingnya kerjasama dan sinergitas. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi maju adalah tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; terbangunnya jaringan sarana dan prasarana pembangunan, pemerintahan dan pelayanan yang merata yang berdampak pada berkurangnya kesenjangan antar wilayah, pembangunan perdesaan dan daerah terpencil; optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah dan sumber-sumber keuangan lainnya bagi kepentingan pembangunan; dan meningkatnya investasi dalam pembangunan didukung kondusifitas daerah.

Sejahtera. Konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil); dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir bathin secara adil dan merata. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi sejahtera adalah terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif; tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan; tingginya tingkat pendapatan perkapita penduduk; turunnya tingkat pengangguran terbuka; tersedianya infrastruktur yang memadai; turunnya jumlah penduduk miskin; tingginya kualitas sumber daya manusia; terpenuhinya hak sosial masyarakat atas akses pada pelayanan dasar; tingginya tingkat Indeks Pembangunan Manusia; tertatanya perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga; tingginya kualitas kehidupan beragama; tingginya peranan perempuan dalam pembangunan.

B. Misi

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah Kabupaten Brebes tahun 2005-2025 sebagai berikut :

1. Mewujudkan pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan local

Makin kuatnya karakter masyarakat yang berbasis pada agama dan nilai-nilai budaya, sehingga manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, bermoral, beretika berdasarkan pada falsafah Pancasila, yang akhirnya mampu berpikir, bersikap, dan bertindak sebagai manusia yang tangguh, kompetitif, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, menunjang nilai-nilai luhur budaya bangsa, mengedepankan kearifan lokal, dan selalu berkembang secara dinamis.

2. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia

Makin meningkatnya kualitas pembangunan manusia, yang ditunjukkan dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, meratanya kesempatan memperoleh pendidikan yang layak; baiknya derajat kesehatan masyarakat didukung kemudahan akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan; menguatnya sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu

pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang; meningkatnya daya saing sumber daya manusia pada kompetisi nasional dan global,berkurangnya kuantitas dan kualitas penyandang masalah kesejahteraan sosial; tercapainya penduduk tumbuh seimbang; meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan; berkurangnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin; meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan mantapnya situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakkan HAM.

3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan partisipatif

Makin meningkatnya nilai dan etika aparatur pemerintah; meningkatnya kinerja penyelenggara tata pemerintahan; meningkatnya profesionalisme aparatur daerah; meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai standar mutu pelayanan yang berorientasi terciptanya kepuasan masyarakat; berkembangnya sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik; meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah; kuatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan peran aktif dalam pengembangan daerah; meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; meningkatnya komitmen mendukung, dan partisipasi stake holders dalam mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dan perbaikan pelayanan umum.

4. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan local

Makin meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita penduduk; membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan lokal hingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas yang berdaya saing global dan menjadi motor penggerak perekonomian; meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik, meningkatnya ketersediaan kebutuhan pokok berbasis pada ketahanan pangan; optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah; meningkatnya kemampuan daerah dan masyarakat (termasuk pengusaha) dalam penyediaan lapangan kerja.

5. Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan prasarana dan sarana daerah

Makin meningkatnya pembangunan dan pemantapan jaringan infrastruktur atau prasarana sarana wilayah yang andal; meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi; terbukanya isolasi daerah hingga terbentuknya pusat atau kawasan pertumbuhan baru; terpenuhinya kebutuhan perumahan rakyat layak huni dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukungnya; terpenuhinya dan

meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah pedesaan dan perkotaan.

6. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Makin meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup; peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ramah lingkungan; peningkatan kepedulian dan partisipasi stakeholders pada upaya pengurangan laju pemanasan global; meningkatnya kualitas dan pengelolaan kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, dan modal pembangunan daerah; meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta mengurangi resiko bencana alam.

BAB III

KEBIJAKAN

Kebijakan merupakan pedoman bagi tindakan - tindakan yang dilaksanakan secara hati-hati yang dapat mempertajam arti strategi, kebijakan pembangunan kecamatan losari diarahkan pada upaya -upaya :

- a. Kebijakan internal yaitu :
 - Mengoptimalkan kinerja anggaran dengan mengalokasikan dana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja Perangkat Desa.
 - Peningkatan kualitas pelayanan publik, yang di arahkan pada peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, peningkatan partisipasi Masyarakat dan sistem pengawasan pelayanan Pemerintahan.
 - Meningkatkan kapasitas dan kemampuan Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- b. Kebijakan eksternal yaitu :
 - Peningkatan koordinasi, harmonisasi dan sinergisme dengan Dinas/Instansi terkait yang ada di Kecamatan losari.
 - Peningkatan akses masyarakat terhadap Pelayanan Pendidikan disegala jenjang dengan fokus pada jenjang pendidikan dasar yang diarahkan pada penyelenggaraan pendidikan dasar sembilan tahun, perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan menurunkan kesengajaan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat.
 - Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas, meningkatkan peran serta dan kesadaran Masyarakat terhadap pola dan perilaku hidup sehat yang diarahkan pada penyelenggaraan pendidikan kesehatan sejak usia dini, promosi dan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan, peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan, pola dan perilaku hidup sehat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan masih dijumpai hambatan/ permasalahan yang disebabkan beberapa faktor, antara lain :

- a. *Bidang Sosial Budaya*
 - Masih tinggal penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan pengangguran terbuka.
 - Rendahnya akses dan mutu pelayanan Pendidikan dan Kesehatan.

- Masih rendahnya kualitas dan kuantitas Insfrastruktur Pendidikan dan Kesehatan.

b. Bidang Ekonomi

- Menurut ketersediaan air dan daya dukung prasarana irigasi, rendahnya produktivitas dan mulut komodasi pertanian, rendahnya kemampuan dan akses petani terhadap sumber daya produktif (pasar) disebabkan oleh sarana dan prasarana transportasi yang kurang mendukung.

c. Bidang Aparatur

- Masih rendahnya tingkat disiplin Aparatur Pemerintahan Kecamatan yang dibarengi dengan lemahnya system pengawasan baik internal maupun eksternal.
- Kemampuan profesionalisme kinerja Aparatur masih jauh dari sasaran yang diharapkan.

Dari permasalahan atau isu yang dihadapi yang berkaitan dengan Kinerja OPD, maka perlu adanya penanganannya yang difokusnya pada tahun yang akan datang, yaitu meliputi langkah - langkah :

- Peningkatan koordinasi, harmonisasi dan sinergisme dengan program dan kegiatan lintas OPD (Dinas/Instansi yang ada di Kecamatan Losari) dalam mewujudkan kebijakan pemerintahan Daerah.
- Tercapainya kemampuan Aparatur Pemerintahan Kecamatan Losari memberikan pelayanan maksimal kepada Masyarakat secara cepat, responsi, efektif dan efesien.
- Meningkatkan disiplin Aparatur Pemerintahan Kecamatan Losari dibarengi dengan meningkatnya kemampuan profesionalisme dan kinerja Aparatur Pemerintahan.

untuk mencapai keinginan tersebut, kebijakan kinerja diarahkan pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan, yang diarahkan pada peningkatan insensitas audit dan pengawasan terhadap sistem kerja aparatur yang lebih konperehensip, standarisasi penilai kinerja aparatur.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya, yang meliputi penetapan kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan visi dan misi kedepan.

Berkaitan dengan prioritas program OPD Kecamatan Losari Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- 2) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
- 3) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
- 4) PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
- 5) PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
- 6) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Prioritas program kegiatan terpilih OPD Kecamatan Losari sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan :

- ✓ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- ✓ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- ✓ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
- ✓ Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- ✓ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- ✓ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- ✓ Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
- ✓ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan.
- ✓ Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 - ✓ Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - ✓ Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
 - ✓ Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 - ✓ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 - ✓ Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

BAB V

PENUTUP

Buku Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Losari tahun 2023 berhasil kami susun untuk pedoman bagi penyelenggaraan pemerintah kecamatan Losari serta dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Adapun secara keseluruhan dalam upaya peningkatan kegiatan program kecamatan Losari terhadap kebijakan yang telah ditentukan yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Diharapkan agar penyusunan Rencana Kerja ini dapat untuk memberikan laporan data dan informasi sebagai bahan penyusunan rekomendasi untuk pengurusan kebijaksanaan Bupati Brebes dalam pembinaan dan pengembangan OPD Kecamatan Losari.

Akhirnya kita panjatkan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa agar kita senantiasa dilimpahi rahmat serta hidayahnya dalam melaksanakan tugas

Losari, 18 April 2022

CAMAT LOSARI

SUMARNO,S.Pd,M.Si

Pembina

NIP. 19680712 199710 1 001